

PENGUATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK Mendukung Industri Kluster

Oleh: Sasi Rais SE, MSi dan Dr. Dance Yulian Flassy, SE, MSi ¹⁾

A. Pendahuluan

Setiap daerah ditantang untuk berbenah diri menghadapi era persaingan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat global. Persaingan ini menuntut setiap bangsa, negara dan daerah untuk berbenah diri dengan memberi lingkungan paling kondusif bagi pelaku bisnis dalam berusaha. Hal ini memerlukan strategi yang dirumuskan oleh segenap komponen pembangunan daerah (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk dapat unggul baik di tingkat regional maupun internasional guna menunjukkan usaha yang paling kompetitif, yang dikenal dengan istilah *daya saing daerah*.

Daya saing daerah juga lebih banyak diartikan sebagai suatu potensi yang bersifat tunggal, sehingga dengan demikian tidak ada upaya pemahaman bagaimana kompleksitas faktor-faktor yang membentuk daya saing daerah tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila didalam pembicaraan mengenai daya saing daerah, opini yang berkembang dapat menjadi sangat beragam dikarenakan masing-masing pihak, baik individu atau pun lembaga melihatnya dari perspektif atau faktor yang berbeda.

Industri kluster sebagai kelompok industri atau konsentrasi antara perusahaan-perusahaan yang saling terkait dan melakukan kerjasama. Dalam industri kluster ada dua (2) elemen pokok, yaitu perusahaan yang ada dalam kluster harus saling berhubungan dan berlokasi di suatu tempat yang saling berdekatan atau mudah dijangkau (kawasan industri).

B. Faktor-Faktor Mempengaruhi

Oleh karena itu, bagaimana nantinya daya saing daerah dapat memberikan dukungan kekuatan terhadap kluster industri suatu daerah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kapasitas Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan berperan dalam rangka untuk memperbaiki lingkungan usaha guna mempengaruhi daya saing daerah. Agus (2003), mengemukakan bahwa pemerintah sekarang dipacu segera mengimplementasikan industri kluster. Persaingan dunia semakin ketat, menuntut daya saing yang semakin tinggi. Masalahnya, negara dan daerah diperhadapkan pada kompetisi dan tantangan yang sama, meski kemampuannya berbeda. Mau tidak mau, suatu negara dan daerah dituntut untuk mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan negara dan atau daerah lain.

Industri kluster di Indonesia sudah diterapkan dibeberapa daerah utamanya kabupaten dan kota di pulau Jawa. Karena keberhasilan instrument kebijakan industri kluster tidak

¹ Dimuat pada Jurnal Pengembangan Bisnis dan Manajemen, STIE PBM, Jakarta, Volume No. XI. 17, April 2011, ISSN-1412-7628. Ditulis oleh Sasli Rais, Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Pengembangan Bisnis dan Manajemen - Jakarta; Dance Yulian Flassy, Doktor Ilmu Administrasi, FISIP - Universitas Indonesia.

terlepas dari berbagai anasir kepentingan politik apakah untuk jangka panjang karena model inisiasi industri kluster umumnya baru menampakkan hasil setelah 5-7 tahun dengan upaya implementasi perbaikan lingkungan usaha bagi pelaku bisnis yang dilakukan secara ketat dan terprogram atau hanya jangka pendek semata misalnya dalam rangka pemilihan kepala daerah.

Agus (2003), bahwa industri kluster menjadi model pengembangan industri nasional jangka panjang. Industri kluster dipastikan dapat meningkatkan daya saing industri karena terjadi hubungan yang saling mendukung antara industri inti, industri penunjang, dan industri terkait. Kluster bukan hanya berarti sentra industri pada suatu lokasi tertentu. Kluster bisa lebih luas menjadi proses kegiatan yang saling mendukung untuk mendorong efisiensi dan produktivitas. Industri kluster tidak berarti harus berdekatan, utamanya bagaimana industri penunjang mendukung industri inti yang tujuannya meningkatkan keunggulan kompetitif.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memoles lingkungan usahanya melalui dukungan system infrastruktur inovasi yang kuat dan sumber daya manusia dengan talenta terbaik sehingga dunia bisnis mampu menghadirkan inovasi dalam berbisnis, termasuk pemerintah memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kluster. Seluruh kemampuan, pendanaan maupun insentif akan ditujukan pada pengembangan industri kluster (Abdullah, 2002: 21-22; KPPOD, 2005: hlm. 6).

2. Dukungan Kultur dan Semangat Berkompetisi

Indonesia sebagai negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya dan juga berlebihan dalam sumber daya manusia. Dalam kondisi interdependensi yang tidak sejajar, kita harus merelakan tersedotnya kelebihan sumber daya kita untuk memakmurkan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bahkan untuk laku di pasaran dunia, produk kita harus menggunakan negara lain sebagai tempat parkir untuk mendapat sertifikasi laik ekspor ke negara-negara yang memerlukannya.

Di Negara-negara maju, kultur yang dikembangkan orang tua dalam mendidik anaknya sudah mengarah pada upaya memandirikan mereka. Sifat protektif dikembangkan sebatas pada tindakan yang menuntut keterlibatan orang tua. Anak-anak mereka tidak pernah dilarang untuk melakukan sesuatu sepanjang bersifat konstruktif bagi perkembangan anak. Seorang anak tidak pernah dilarang untuk mengembangkan aktivitas meskipun aktivitas tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat mencelakakan mereka. Mereka diajarkan bagaimana menghindari bahaya bila melakukan sesuatu kegiatan, bukan dengan menghindarkan diri dari kegiatan tersebut. Pola hubungan orang tua dan anak dikembangkan secara demokratis sehingga anak-anak mereka tidak takut untuk bertanya ataupun membantah perintah orangtuanya bila menurut logika masyarakat beradab bantahan tersebut sangat rasional untuk mendidik anak menjadi mandiri. Kondisi kemandirian ini pada akhirnya akhir menjadi dukungan terhadap sumber daya saing daerah (Sudantoko, 2002: hlm 53-54).

Krisis ekonomi dari sisi positif, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari krisis ekonomi tersebut untuk lebih efektif lagi memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara. Sangat beralasan bagi pemerintah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berkompetisi sehingga di masa datang akan memberikan hormat yang tinggi terhadap daya juang daerah dan negara ini dalam mengambil manfaat dari era globalisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya kehidupan yang demokratis di rumah tangga, sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan birokrasi pemerintah. Di lingkungan birokrasi

pemerintah, kesadaran berkompetisi ini dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai profesionalisme dalam bekerja dan memberikan penghargaan kepada mereka yang mempunyai prestasi, inovasi dan kemampuan sehingga seorang pejabat tidak harus menunggu masanya untuk menduduki jabatan karier yang tinggi, dan masyarakat pun tidak kaget lagi bila melihat seorang birokrat muda menduduki jabatan dengan tingkat eselon yang tinggi. Pemerintah harus menjadi pelopor bagi masyarakat dalam membangkitkan kesadaran akan pentingnya berkompetisi agar menjadi daerah dan atau negara yang dihormati dalam pergaulan regional dan internasional (Sudantoko, 2002: hlm. 56)

3. Partisipasi Aktif Stakeholder

Peran pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan berperan dalam rangka untuk memperbaiki lingkungan usaha guna mempengaruhi daya saing daerah. Partisipasi aktif ini menurut Bourdieu dalam Syafi'i (2007, hlm. 109) juga merupakan modal sosial dalam pembangunan ekonomi daerah dalam pembangunan industri kluster. Pemda dalam hal ini dapat berperan didalam memfasilitasi lintas pelaku pendukung industri kluster (Hartarto, hlm. 66). Pemerintah daerah yang kurang maju dapat membentuk tim lintas disiplin dalam kluster seperti perguruan tinggi, LSM, lembaga pengembang teknologi, ahli pemasaran, dan masyarakat lokal (Bappenas, 2000). Menurut Agus (2003) bahwa industri kluster atau tepatnya sentra industri sudah banyak terbentuk. Namun, sentra masih belum menunjukkan adanya keterkaitan dengan industri pendukung. Model industri kluster yang akan diterapkan menekankan pada *partnership*. Tidak hanya menekankan pembangunan industri tapi memperkuat *partnership* antara industri prioritas, terkait dan pendukung, Penerapan industri kluster harus mendasarkan pada latar belakang budaya dan kondisi alam daerah, salah satu contohnya adalah partisipasi dan koordinatif aktif pemerintah daerah dan masyarakatnya. Contoh dalam hal ini adalah keberhasilan provinsi Oita, Jepang melaksanakan *One Village One Product* (OVOP) sebagai suatu gerakan revitalisasi daerah untuk mencari atau menciptakan apa yang menjadi merk daerah, lalu meningkatkan isi dan mutunya sehingga dapat diterima dan diakui nilainya secara nasional dan internasional. Latar belakang program OVOP dalam rangka menghidupkan kembali vitalitas di perdesaan, dengan membangkitkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan skala dan ukuran perdesaan tersebut, di samping untuk mengurangi rasa ketergantungan masyarakat desa yang terlalu tinggi terhadap pemerintah daerah dan perlu menciptakan inisiatif dan semangat revitalisasi dalam masyarakat desa. Keberhasilan OVOP di provinsi Oita, Jepang karena pemda dapat memanfaatkan semua potensi yang ada melalui:

- 1) Partisipasi dan koordinasi dengan aparat sampai tingkat bawah (desa) untuk mendiskusikan konsep OVOP ini;
- 2) Pejabat berwenang langsung turun lapangan untuk mengawal konsep OVOP setiap hari;
- 3) Memanfaatkan media massa khususnya TV untuk membangkitkan pelaksanaan OVOP;
- 4) Pemerintah daerah mempersiapkan berbagai lembaga kajian dan laboratorium untuk mendukung upaya promoasi produk yang khas desa;
- 5) Membentuk pondok belajar (pusat latihan) di beberapa tempat untuk menghasilkan local leader yang menjadi pelopor dan penggerak OVOP di desa;
- 6) Pemerintah daerah Oita berusaha memperkenalkan informasi produk-produk khas OVOP kepada masyarakat di dalam dan luar Oita termasuk gubernur Oita sendiri; dan

- 7) Pemerintah daerah Oita memberikan penghargaan terhadap orang atau kelompok yang berusaha sukses melaksanakan OVOP (Kazuhiza, 2005: hlm 5-6).

Pengalaman OVOP telah dijadikan pelajaran di beberapa negara berkembang dan sebagian menerapkan konsep OVOP untuk membuat gerakan serupa, antara lain di China (Shanghai, Wuhan, Jiangsu, Shanxi, Jiangxi), Philipina, Thailand, Malaysia, Kamboja, Laos, Mongolia, USA, dan Indonesia (Kazuhiza, hlm. 10) yang pernah secara langsung diterapkan di provinsi Jawa Timur pada saat Gubernur Basofi Sudirman. Namun progam OVOP pada era gubernur Basofi ini ada yang mengatakan berhasil tetapi juga ada yang mengatakan tidak berhasil karena kebijakan pelaksanaan OVOP ini lebih banyak untuk kepentingan politik gubernur Basofi.

Agus mengemukakan (2003), bahwa justru industri kluster menangani industri secara mendalam, antara lain mulai dari pemetaan masalah, pembangunan infrastruktur, meperkuat jaringan akses pendanaan sehingga melakukan inovasi untuk mengembangkan produktivitas. Hanya diharapkan penerapan sistem industri kluster sangat tergantung kepada efektivitas hubungan kerja sama pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha. Tanpa kerja sama dan komitmen yang tinggi, pengembangan industri nasional mandek.

4. Pentingnya Keamanan

Beberapa hal menarik dari para pengusaha Czeh maupun Austria dalam merespon kunjungan pemda Jawa Tengah adalah kesungguhan mereka untuk berbisnis dengan para pengusaha Jawa Tengah yang terlihat dari jumlah pengusaha yang menghadiri *business matching* di kedua negara melebihi target dan transaksi bisnis yang langsung dilakukan dengan pengusaha Jawa Tengah yang ikut dalam misi dagang seketika itu, adanya komitmen beberapa pengusaha untuk berkunjung ke Jawa Tengah guna menindaklanjuti kesepakatan yang telah mereka buat dengan pengusaha Jawa Tengah dan yang paling penting adalah bahwa mereka percaya dengan tingkat keamanan yang tercipta di Propinsi Jawa Tengah setelah mendapat penjelasan menyeluruh dari Tim pemda Jawa Tengah.

Kepercayaan terhadap rasa aman bagi negara lain terhadap suatu daerah dan negara lain ini menjadi suatu hal yang mampu untuk mengundang datang ke daerah dan Negara tersebut. Memang hal ini diperlukan adanya jaminan juga oleh pemerintah setempat (Sudantoko, 2002: hlm. 61; Abdullah, Pitter dkk.: 2002: hlm 20; KPPOD, 2005: hlm. 6).

5. Peran LSM Daerah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang umumnya lahir antara lain karena keinginan untuk memperbaiki persoalan-persoalan kemiskinan, kesenjangan perlakuan hukum dan pemerataan di tengah masyarakat serta menyuarakan secara kongkrit apa yang menjadi cita-cita masyarakat kepada pemerintah dan mengkritisi tindakan pemerintah (juga legislatif) mempunyai peran yang strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan otonomi daerah utamanya didalam mendukung daya saing daerah sebagai industri kluster.

Apapun yang terjadi pada saat ini, pemerintah masih mempunyai komitmen yang kuat untuk menjadikan LSM sebagai salah satu *stakeholders* yang ikut menentukan arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. LSM merupakan salah satu elemen masyarakat yang diajak Pemerintah untuk menyempurnakan program dan bagaimana cara terbaik bagi Pemerintah dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Meskipun tidak dapat dipungkiri, tidak jarang pada sisi yang lain Pemerintah melihat LSM sebagai kerikil yang membuat pemerintah lamban dalam mengambil sikap. Dari sudut rasionalisme seringkali saya mengatakan dan menulis dalam media massa bahwa

pemerintah dimanapun selalu menginginkan dukungan dari rakyatnya (Sudantoko, 2002: halm 74)

Sangat mustahil bila ada pemerintahan, terutama dalam alam demokratis, yang menisbikan keberadaan masyarakat. Sebab sebuah program pemerintah akan berhasil bila mendapat dukungan dari rakyatnya. Bagaimanapun baiknya sebuah program yang dicirikan dengan kemampuannya mengatasi persoalan dan menempatkan alokasi sumber daya secara tepat, bila program ini jauh dari keterlibatan masyarakat, outputnya tidak pernah akan mencapai sasaran yang ditargetkan. Dalam perspektif pemerintah dengan berbagai pertimbangan yang rasional, LSM merupakan lembaga masyarakat yang dapat merealisasikan konsep tersebut. Tentunya LSM yang diharapkan bukanlah LSM yang siap melakukan apapun untuk kepentingan pemerintah tetapi LSM yang murni menilai bahwa keterlibatannya memang dibutuhkan karena program pemerintah mempunyai dimensi yang kental dengan aspek-aspek kerakyatan.

Dalam alam kehidupan yang segala sesuatunya dinilai berdasarkan perspektif *benefit cost ratio* dan dogma ekonomi "mengeluarkan sedikit untuk mendapatkan hasil sebesar mungkin", tentunya akan sulit bagi LSM untuk menjaga dan memelihara visinya terutama ketika keterlibatan ini lebih didominasi oleh kepentingan "perut" daripada "hati nurani" iklim seperti ini tidak hanya dihadapi oleh LSM, tetapi juga profesi-profesi lain yang seharusnya mengandung lebih banyak sisi sosialnya daripada sisi ekonominya.

Tarikan ekonomi yang sangat kuat menjadi pemicu yang menyuburkan budaya ekonomi ketimbang budaya sosial. Pelayanan-pelayanan sosial pun tidak lagi menjadi bagian inheren dari masyarakat yang tidak mampu. Kini pelayanan seperti itu pun akhirnya disahkan menjadi milik sekelompok masyarakat yang mampu mengaksesnya. Untuk mendapatkan segala pelayanan yang terbaik, mulai dari keadilan, pendidikan, kesehatan bahkan dakwah agama terbaik, hanya masyarakat yang mampu menimbangnya secara ekonomi yang akan mendapatkan. Perbedaan antara nilai sosial dan ekonomi begitu tipis, bahkan tidak jarang ketika kita membicarakan persoalan nilai-nilai sosial dan kerakyatan kita seolah-olah menjadi makhluk yang langka. Makin menguatnya budaya ekonomi ketimbang budaya sosial tidak terlepas dari rendahnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai moral atau etika yang selama ini menjadi ciri khas bangsa timur. Etika adalah nilai yang akan menumbuhkan kekuatan moral, harga diri dan kredibilitas yang perlu dikembangkan oleh individu ataupun lembaga. Membangun LSM yang independent, demokratis, mandiri, akuntabel dan profesional menuntut adanya etika yang mampu menimbulkan rasa malu bagi LSM yang melanggarnya (Sudantoki, 2002: 77).

LSM yang mendasarkan tingkah lakunya dengan etika yang disepakati tidak akan kesulitan menjadi LSM yang "disegani" dan menjadi kontrol yang efektif bagi Pemerintah serta menjadi representasi yang dihargai dari suara masyarakat. Ditengah keraguan terhadap efektifitas sanksi hukum dalam menertibkan konflik-konflik hukum, menegakkan etika seharusnya menjadi embrio untuk memperkuat pelaksanaan sanksi hukum. Memang tidak ada sanksi bagi mereka yang melanggar etika, tetapi masyarakat akan menghukumnya secara sosial. Tidakkah LSM tergerak menjadi pionir untuk hal yang kini langka di masyarakat dalam rangka mendukung daya saing daerah di masa depan.

Contoh daerah yang mencoba memanfaatkan potensi keberadaan LSM ini adalah Pemda Jawa Tengah dan Jawa Barat memanfaatkan kondisi LSM ini dengan melihat LSM sebagai salah satu *stakeholders* yang efektif dan diperlukan dalam membahas persoalan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan dan sebagai pelaksana ataupun "*watch dog*" pembangun itu sendiri. Dalam rangka pengembangan sumber daya daerah, pemda

telah membentuk forum yang anggotanya mencakup seluruh *stakeholders* termasuk LSM. Salah satu tugas forum adalah merancang program pemberdayaan usaha kecil dan menengah termasuk perkembangan di sektor agribisnis. Kedua sektor ini memang menjadi domain dari program pemda untuk mempercepat pemulihan ekonomiregional dari krisis. Partisipasi LSM di kedua sektor ini terlihat paling menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya (Sudantoko, 2002: 71-72).

6. Nasionalisme

Keinginan memberdayakan masyarakat daerah sendiri terutama kehidupan politik dan ekonomi makin menguat sehingga melahirkan sifat-sifat otoritarian yang menisbikan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan kesukuan menjadi epidemi yang sulit dihindari. Nasionalisme tidak lagi menjadi komitmen bangsa. Primordialisme tumbuh dan berkembang sebagai alat yang paling efektif bagi pemimpin-pemimpin politik lokal untuk menarik simpati dan suara rakyat serta memegang kekuasaan.

Di kala kita disibukkan dengan tindakan primordialisme, tanpa disadari spirit nasionalisme tampak makin rentan ketika dihadapkan kepada kekuatan kapitalisme internasional. Kekuatan ini di masa datang akan menjadi neokolonialisme yang secara perlahan dan bertahap mampu mempengaruhi dan menjerat bangsa Indonesia kedalam alam ketergantungan yang sangat besar. Sehingga tidak tertutup kemungkinan mereka dapat menjadi panglima yang mengemudikan urusan-urusan negara dan bangsa secara keseluruhan.

Dalam dunia yang serba "wireless", nirkabel atau tanpa batas, tidak ada satu bangsa pun yang dapat menghindarkan diri dari interaksi sosial, budaya maupun ekonomi. Dengan populasi terbesar kelima di dunia dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka akan melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkannya. Sementara kondisi ekonomi kita yang serba terbatas menuntut pemerintah daerah atau pun pusat mencari modal tambahan guna memacu pertumbuhan ekonominya. Dalam posisi yang demikian, pasar dipaksa untuk membuka diri sebagai kompensasi dari kebutuhan modal sehingga jelas tidak mungkin bagi kita untuk mengisolasi diri lepas dari komunitas dan permainan antar negara. Kita tentu berharap akan mendapatkan *spread effect* dan bukan *backwash effect* (Sudantoko, 2002: hlm. 64-66)

Spread effect akan mendorong terjadinya proses transformasi teknologi dan mobilitas modal yang aktif ke negara lain. Dengan demikian keterbatasan-keterbatasan yang selama ini menjadi penghalang tergalinya potensi ekonomi daerah dan atau negara dapat dieliminasi. Interaksi kedalam masyarakat internasional akan mempengaruhi pelaku ekonomi domestik untuk melakukan transformasi manajemen ke arah yang lebih efisien dan mengurangi budaya yang kurang mendukung nilai-nilai kompetisi (Syafi'i, 101-102).

Namun sekarang justru kita menyaksikan adanya *backwash effect* berupa pelarian modal yang agresif ke luar negeri karena faktor keamanan dan adanya garansi yang lebih pasti bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan mengendap di dalam negeri. Selain itu *backwash effect* juga ditunjukkan oleh akumulasi ketergantungan teknologi yang miskin lama makin besar terhadap pemilik teknologi sehingga sangat menyulitkan bagi bangsa ini untuk melepaskan diri dan membangun industri domestik yang andal. Kondisi demikian akan sangat mengurangi terhadap daya saing daerah (Munir dan Fitanto, 2005: hlm. 45) untuk menuju industri kluster yang tangguh (Sudantoko, 2002: 67).

Contoh, yang paling mudah adalah budaya Mc Donald yang mewabah di kalangan anak-anak dan generasi muda adalah merupakan contoh lain bahwa ketergantungan yang sekarang dirasakan tidak hanya dari sudut teknologi dan modal saja tetapi juga budaya. Dalam hubungan yang nyaris menempatkan bangsa kita kedalam posisi *peripheral* atau pinggiran, tentunya suasana egaliter yang diharapkan tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Keadaan yang demikian harus dikikis secara bertahap agar kita berani mengatakan tidak kepada kekuatan kapitalisme internasional untuk sesuatu yang menurut analisis rasional akan menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan. Ketika kita mengatakan tidak, bangsa lain yang lebih superior akan mengetahui bahwa penolakan ini memang benar-benar dinyatakan oleh bangsa yang tidak dapat diremehkan, bangsa yang dapat membedakan antara kepentingan nasionalisme dan kepentingan ekonomi.

C. Penutup

Oleh karena itu, diharapkan apabila faktor-faktor penguatan daya saing daerah dalam rangka mendukung industri kluster tersebut dapat terlaksana, maka tidak saja daerah memiliki kekuatan di internal (tingkat regional dan nasional) tetapi juga dapat bersaing dengan daerah-daerah di negara lainnya.

Literatur:

- Abdullah, Pitter, 2002, Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, Cetakan Pertama, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia bekerjasama BPFE, Jogjakarta.
- Bappenas, 2000, Mengenal Kluster, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Jakarta.
-, 2000, Kluster Industri untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Jakarta.
- Hartarto, Airlangga, 2004, Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit ANDI, Jogjakarta.
- Kazuhiza, Matsui, 2005, Gerakan One Village One Product (OVOP): Suatu Upaya Revitalisasi Daerah di Jepang, Proyek Kebijakan Pembangunan Daerah untuk Pemerintah Daerah (RDPLG) kerjasama JICA dan Ditjen Pembangunan Daerah, Depdagri, Jakarta.
- KPPOD, 2005, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia 2004: Persepsi Dunia Usaha, kerjasama USAID-The Asia Foundation-KPPOD, Jakarta.
- Munir, Risfan dan Futanto, Bakhtiar, 2005, Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan, dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan, Cetakan Kedua, Local Governance Support Program (LGSP), Jakarta.
- Sudantoko, Djoko, 2002, Dilema Otonomi Daerah, Cetakan Pertama, Penerbit ANDI, Jogjakarta.
- Syafi'i, H.M., 2007, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah: Perspektif Teoritik, Cetakan Pertama, AVERROES PRESS, Malang.
- Tjahajana, Agus Dari Klaster Menuju Peningkatan Daya Saing Industri, www.sinarharapan.co.id, download pada tanggal 01 Juli 2008.
- http://www.bappeda-jabar.go.id/bappeda_design/dokumen_informasi.ph, Kluster Industri Jawa Barat, download pada tanggal 01 Juli 2008.

